

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh penyedia yang digunakan untuk memenuhi serta mendapatkan segala sesuatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang menjadi bagian terpenting di dalam pemenuhan kebutuhan setiap instansi pemerintahan. untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, saat ini dapat melalui proses pengadaan barang jasa secara elektronik (*e-procurement*) dengan memanfaatkan pasar elektronik (*e-marketplace*) yang disediakan oleh pemerintah dalam menyediakan pengadaan barang dan jasa melalui infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia seperti tata cara pembelian barang dan jasa (*e-purchasing*) melalui katalog elektronik (*e-catalogue*), toko daring (*online shop*) dan pemilihan penyedia (Adi, 2018).

Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah dengan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*. *E-procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi (Suprianto et al., 2019).

E-procurement dapat diartikan sebagai proses pengadaan barang/ jasa yang menyeluruh dimana organisasi memanfaatkan elektronifikasi system menggunakan teknologi informasi dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemerintah kepada swasta selaku penyedia barang dan layanan jasa. Dalam perkembangan terbaru mengenai e-procurement, sistem ini semakin terintegrasi dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna, seperti kemudahan penggunaan, dukungan teknis, dan tingkat keamanan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepuasan pengguna sangat dipengaruhi oleh desain intuitif sistem dan adanya dukungan teknis yang memadai, sementara ketidakpuasan sering timbul akibat kompleksitas sistem yang sulit dipahami atau kekurangan dukungan operasional (Ragin-Skorecka & Hadaś, 2024; Zhang, 2023)

Selain itu, transformasi digital dalam sistem pengadaan semakin berfokus pada efisiensi dan keberlanjutan. E-procurement berperan dalam pengurangan biaya operasional serta peningkatan produktivitas. Penggunaan teknologi digital ini memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih cepat dan transparan, yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Hadaś & Ragin-Skorecka, 2024)

E-procurement memberikan beberapa manfaat signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pertama, sistem ini dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi waktu. Dengan mengintegrasikan prosedur pengadaan secara digital, biaya administrasi dan komunikasi dapat diminimalkan, memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk kebutuhan

lainnya. Selain itu, proses pemesanan barang menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu tunggu untuk penerimaan barang atau jasa yang diperlukan. Standar prosedur yang efisien dalam *e-procurement* juga membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan konsistensi dalam proses pengadaan.

Kedua, *e-procurement* menyediakan lebih banyak pilihan penyedia barang dan jasa, serta memberikan pengendalian penuh atas pengeluaran pengadaan. Dengan akses ke database yang luas, pengguna dapat membandingkan berbagai penyedia dari segi harga, kualitas, dan ketersediaan, sehingga dapat membuat keputusan pengadaan yang lebih informatif dan kompetitif. Sistem *e-procurement* juga memungkinkan pelaporan dan pemantauan pengeluaran secara lebih efektif, membantu dalam mengidentifikasi potensi pemborosan dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran. Selain itu, *e-procurement* memangkas jumlah dokumen fisik yang harus disediakan, memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan dokumen secara elektronik, yang memudahkan akses dan audit dokumen. Manfaat-manfaat ini menunjukkan bagaimana *e-procurement* dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa (Muffatto & Payaro, 2020)

Dengan adanya *e-procurement*, akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan melalui keterbukaan pengadaan publik, kepastian Perjanjian pengadaan dalam dokumen kontrak yang diberikan kepada calon penyedia dengan penawaran terbaik (Oliveira & Amorim, 2016). Perubahan mekanisme pemilihan penyedia dari konvensional menjadi elektronik

pengadaan mengarah pada meningkatnya supply chain dan arus informasi antara penyedia dan stakeholder menjadi lebih baik (Johnson & Whang, 2022).

Kehadiran *e-procurement* dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan secara konvensional yang dilakukan secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan, sehingga pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut untuk melakukan pembaharuan, dengan *e-procurement* dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan adil/diskriminatif, akuntabel, dan juga meminimalisasi praktek curang/KKN yang merugikan keuangan negara (Ariesta, 2021). Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) berupaya untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini dikarenakan katalog elektronik (*e-catalogue*) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (*e-catalogue*) dengan cara mempermudah akses masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (*e-catalogue*), sehingga masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan secara eksternal (Laditaputri, 2019).

Proses pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi, telah mengalami perkembangan signifikan dari waktu ke waktu. Sebelum tahun 2000, pengadaan dilakukan melalui tender manual, di mana pengajuan dan evaluasi dokumen dilakukan secara fisik menggunakan kertas. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap ketidaktransparanan dan inefisiensi.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, metode ini mulai dianggap usang, sehingga pemerintah mengadopsi tender elektronik atau *e-procurement* pada tahun 2003. Dengan teknologi informasi (IT), pemerintah memperkenalkan proses pengadaan yang lebih cepat dan transparan, mempermudah evaluasi dan pengawasan pengadaan jasa konstruksi.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada 2008, ketika pemerintah memperkenalkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang lebih terstruktur. Sistem ini memfasilitasi pengadaan secara online, memungkinkan persaingan yang lebih adil, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi. Saat ini, proses tersebut telah berkembang menjadi sistem e-katalog, di mana penyedia jasa yang terdaftar dapat langsung dipilih sesuai kebutuhan tanpa melalui tender konvensional. Sistem e-katalog menawarkan transparansi, kemudahan akses, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam hal waktu dan biaya.

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, implementasi *e-catalog* sangat relevan mengingat kebutuhan akan pengadaan yang lebih efisien dan transparan dalam mendukung berbagai program. Tahun 2024 menjadi tonggak penting karena ini adalah pertama kalinya pengadaan jasa konstruksi dilakukan melalui *e-catalog*. Penggunaan e-catalog membantu mempercepat proses pengadaan dengan meminimalkan birokrasi yang panjang dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, adanya fitur *e-catalog* yang memudahkan pemilihan penyedia jasa sesuai kebutuhan tanpa harus melalui tender konvensional menjadi keunggulan yang sangat dibutuhkan dalam operasional kementerian.

Pada *e-catalog*, terdapat beberapa jenis metode seperti nasional, lokal, dan sektoral. Kementerian Agama DIY menggunakan *e-catalog* sektoral, yang tampilannya berbeda dari jenis *e-catalog* lainnya. Setiap etalase di *e-catalog* sektoral memiliki antarmuka yang unik, dan alur teknis dalam implementasinya juga berbeda. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah peralihan dari penggunaan *Bill of Quantity* (BQ) dalam LPSE 4 ke BQ dalam *e-catalog*. Jika sebelumnya rincian BQ serupa dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dalam sistem *e-catalog*, volume pekerjaan seperti beton harus ditotal secara keseluruhan. Perubahan ini memerlukan adaptasi baik dari sisi pengguna jasa maupun penyedia jasa.

Adaptasi terhadap pembaruan sistem ini tentu membutuhkan waktu. Pengguna jasa dan penyedia harus mempelajari teknis baru dalam pengisian BQ serta mematuhi alur yang ditetapkan oleh sistem *e-catalog* sektoral. Meskipun ada tantangan dalam masa transisi ini, pengenalan sistem baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengadaan. Dalam jangka panjang, sistem *e-catalog* akan memudahkan koordinasi, mempercepat waktu pelaksanaan, serta meningkatkan kualitas layanan pengadaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian Agama DIY.



Gambar 1.1 Tampilan Katalog Elektronik LKPP

Sumber: <https://e-katalog.lkpp.go.id/>

Implementasi e-katalog dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY yang baru diberlakukan pada tahun 2024 menekankan pentingnya efisiensi dalam proses pengadaan tersebut. Sebagai metode baru yang menggantikan prosedur pengadaan manual dan LPSE konvensional, e-katalog bertujuan untuk mempercepat proses administrasi pengadaan, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan kesalahan manusia. Efisiensi dalam konteks ini bukan hanya terkait dengan penghematan biaya, tetapi juga mempercepat pencapaian target pelaksanaan proyek konstruksi, terutama mengingat banyaknya program dan kegiatan yang harus diselesaikan oleh kementerian. Dengan penerapan e-katalog, proses pengadaan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan diharapkan bisa diselesaikan dalam hitungan minggu atau bahkan hari, bergantung pada kompleksitas pekerjaan dan kesiapan sistem pendukungnya (Sunaryo, 2023).

Efisiensi juga menjadi krusial karena sistem e-katalog memungkinkan penyedia jasa yang telah terdaftar di platform tersebut untuk langsung dipilih berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan proyek yang sedang berjalan. Hal ini berbeda dengan metode tender konvensional yang melibatkan proses seleksi yang panjang, pengajuan dokumen fisik, dan tahapan evaluasi manual. Dengan e-katalog, para pengguna jasa dapat memilih penyedia yang sesuai tanpa harus melalui proses lelang terbuka yang kompleks dan lama. Studi oleh Rahman et al. (2022) menunjukkan bahwa pengadaan melalui e-katalog mampu menghemat hingga 30% dari waktu proses pengadaan tradisional, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan transparansi. Lebih lanjut, efisiensi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan yang dikelola oleh pemerintah.

Namun, meskipun e-katalog menjanjikan efisiensi yang lebih tinggi, ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam masa transisi ini. Adaptasi dari Bill of Quantity (BQ) LPSE 4 ke BQ dalam e-katalog, misalnya, memerlukan pemahaman dan pelatihan yang mendalam baik bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa di lingkungan Kementerian Agama DIY. Dalam sistem e-katalog, perhitungan volume pekerjaan seperti beton harus dilakukan secara keseluruhan, berbeda dengan metode sebelumnya yang lebih rinci berdasarkan HPS. Perubahan ini dapat memperlambat proses pada awal implementasi, karena pengguna membutuhkan waktu untuk mempelajari prosedur baru. Menurut hasil penelitian Santoso (2021), pada tahap awal implementasi sistem pengadaan

baru, ada potensi perlambatan produktivitas karena adaptasi teknis yang diperlukan.

Selain itu, aspek efisiensi tidak hanya berkaitan dengan waktu dan biaya, tetapi juga dengan kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang diharapkan dari sistem e-katalog. Kualitas ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penyedia jasa mampu memahami dan memanfaatkan platform baru ini secara efektif. Menurut Hamzah (2022), e-katalog memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengadaan dengan memastikan bahwa penyedia jasa yang terlibat adalah mereka yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian. Namun, untuk mencapai efisiensi yang optimal, kementerian harus terus memantau dan mengevaluasi proses implementasi e-katalog, termasuk menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis yang muncul. Kesuksesan sistem ini akan sangat bergantung pada bagaimana pihak-pihak yang terlibat beradaptasi dan memaksimalkan penggunaannya dalam mendukung program dan proyek yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas E-Katalog pada Proses Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kementerian Agama Kanwil DIY.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan e-katalog dalam proses pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY?

2. Apa saja kendala yang dihadapi pengguna e-katalog dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi pengguna e-katalog dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY?
4. Bagaimana dampak penggunaan e-katalog terhadap kualitas hasil pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas penggunaan e-katalog dalam proses pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pengguna e-katalog dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pengguna e-katalog dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY.
4. Menganalisis dampak penggunaan e-katalog terhadap kualitas hasil pengadaan jasa konstruksi di Kementerian Agama Kanwil DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini memperkaya literatur terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam konteks penggunaan e-katalog di sektor publik, serta dampaknya terhadap efektivitas proses pengadaan.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori tentang efisiensi pengadaan dengan e-katalog, menyoroti bagaimana sistem ini mempengaruhi keputusan, waktu, dan biaya dalam pengadaan barang dan jasa.
 - c. Penelitian ini memberikan wawasan akademis mengenai peran teknologi digital, khususnya e-katalog, dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di sektor konstruksi pemerintah.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi Kementerian Agama Kanwil DIY dalam meningkatkan efisiensi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi, dengan memanfaatkan sepenuhnya fitur e-katalog.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan masukan praktis untuk pembuat kebijakan dalam memperbaiki prosedur pengadaan melalui e-katalog, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya serta meningkatkan transparansi.
 - c. Penyedia jasa konstruksi dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memahami cara kerja dan manfaat dari e-katalog, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengikuti dan memenangkan proses pengadaan melalui platform tersebut.

1.5 Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Geografis

Penelitian ini hanya mencakup Kementerian Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

a. Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY

- 1) Subjek penelitian adalah pegawai Kementerian Agama Kanwil DIY yang terlibat dalam proses pengadaan jasa konstruksi.
- 2) Subjek berperan sebagai pengambil keputusan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui e-katalog.
- 3) Subjek memahami dan menggunakan sistem e-katalog dalam pengadaan paket jasa konstruksi.
- 4) Subjek bertanggung jawab atas paket pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai di atas 1 miliar rupiah.

b. Penyedia Jasa

- 1) Subjek penelitian adalah penyedia jasa konstruksi yang memenangkan pekerjaan di lingkungan Kementerian Agama Kanwil DIY melalui e-katalog.
- 2) Pekerjaan yang dimenangkan bernilai lebih dari 1 miliar rupiah.
- 3) Subjek adalah pemilik, pengambil keputusan, atau pelaksana pekerjaan konstruksi yang menggunakan aplikasi e-katalog dan telah dinyatakan sebagai pemenang di Kementerian Agama Kanwil DIY.

c. Aspek yang Diteliti

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penggunaan e-katalog, meliputi:

- 1) Efisiensi pada penelitian ini adalah efisien tenaga dan waktu.
- 2) Pemahaman dan penerapan e-katalog oleh pengguna.

- 3) Dampak penggunaan e-katalog terhadap efisiensi dan efektivitas proses pengadaan.
- 4) Kendala dan tantangan dalam penggunaan e-katalog.
- 5) Penelitian ini tidak mencakup aspek lain yang mungkin berhubungan dengan penggunaan e-katalog, seperti integrasi dengan sistem lain, keamanan data, atau analisis biaya secara mendetail.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan uraian atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab kedua mengemukakan teori yang menjadi dasar dalam penelitian, memberikan penjelasan terkait beberapa hal seperti dasar teori yang mendukung penelitian, termasuk di dalamnya hasil penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga mengambil bagian dalam memberikan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena sosial, termasuk aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat merupakan bab yang mengulas analisis data serta pelaksanaan pengujian triangulasi.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima merupakan bagian terakhir dalam mengungkapkan kesimpulan serta saran, yang memberikan ringkasan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat digunakan.

